

**LEMBAR HASIL PENILAIAN
SEJAWAT SEBIDANG atau PEER REVIEW**

KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : **The Act Against The Law Of Counterfeiting The Covid 19 Vaccine In The Health Law**

Jumlah Penulis : 1 Orang

Nama-nama Penulis : Sahuri Lasmadi

Status Penulis : Penulis ke 1

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama jurnal : **International Journal of Law Reconstruction (IJLR)**
- b. Nomor ISSN : **E-ISSN 2775-8885**
- c. Vol., No., Bulan, Tahun : **Volume 5, Number 2, September 2021**
- d. Penerbit : **Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang**
- e. DOI Artikel (jika ada) : **DOI:http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17545**
- f. Alamat Web Jurnal : **http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lawreconstruction/article/view/17545/5821**
- g. Terindeks di : **Sinta 2**
<https://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=6197>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi **)

(beri tanda √ yang dipilih) ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

☐ Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks ***)

HASIL PENILAIAN Peer Review :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal JURNAL ILMIAH			Nilai Akhir Yang Diperoleh *)
		Internasional / Bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional ***) ☐	
1	Kelengkapan unsur isi karya (10%)		2,5		2,5
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		7,5
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		7
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan (30%)		7,5		7
	Total 100%		25		24
	Kontribusi Pengusul Penulis ke 1 100% x Nilai Akhir yang diperoleh = 24 x 1 = 24				

Catatan Penilaian ARTIKEL oleh Reviewer/Komentar Peer Review:

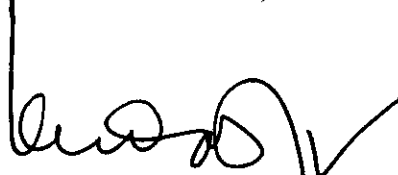
1. Tulisan dalam artikel yang diusulkan ini merupakan jurnal yang terbit di Sinta 2 dan memenuhi kelengkapan unsur-unsur sebagai artikel dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi. Karena dalam artikel membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Vaksin Covid 19 Dalam Undang-Undang Kesehatan. Pokok pembahasan difokuskan Masalah pemalsuan vaksin bukan masalah kesehatan belaka tetapi juga masalah hukum, mengingat bahwa hukum memerintahkan tujuan utama. Kebutuhan ketertiban ini merupakan kondisi mendasar bagi adanya masyarakat manusia yang tertib.
2. Ruang lingkup & kedalaman pembahasan Tulisan dalam Artikel ini masuk dalam ruang lingkup jurnal ilmiah mengingat dalam jurnal ini ada ide pengembangan hukum mengenai mengenai perbuatan melawan hukum pemalsuan Vaksin Covid-19 dalam Hukum Kesehatan merupakan kejahatan pemalsuan, di mana mengandung unsur berupa keadaan objek yang tidak benar atau salah bahwa sesuatu hanya dari luar seolah-olah benar ketika fakta ini bertentangan dengan kebenaran. Tindak

pidana pemalsuan vaksin Covid-19 umumnya diatur dalam Pasal 386 Ayat 1 KUHP terkait tindak pidana penipuan dan pemalsuan. Namun, hal itu secara khusus diatur dalam peraturan mengenai hukuman pendistribusikan vaksin palsu di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 196, 197, 198, dan UU 201 Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Kecukupan dan kemutakhiran dalam Penelitian sangat memadai karena metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perbuatan melawan hukum pemalsuan Vaksin Covid-19 dalam Hukum Kesehatan merupakan kejahatan pemalsuan, di mana mengandung unsur berupa keadaan objek yang tidak benar atau salah bahwa sesuatu hanya dari luar seolah-olah benar ketika fakta ini bertentangan dengan kebenaran. Tindak pidana pemalsuan vaksin Covid-19 umumnya diatur dalam Pasal 386 Ayat 1 KUHP terkait tindak pidana penipuan dan pemalsuan. Namun, hal itu secara khusus diatur dalam peraturan mengenai hukuman pendistribusikan vaksin palsu di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 196, 197, 198, dan UU 201 Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. D Tulisan dalam artikel ini ada hal baru yang ditawarkan bahwa memproduksi dan mengedarkan persiapan vaksin palsu, yang dimaksudkan dengan memproduksi atau melakukan proses produksi, adalah upaya untuk mengubah satu kebaikan menjadi yang lain atau mewujudkan layanan. Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam kesengajaan, yaitu niat yang disengaja, kepastian yang disengaja, dan tindakan yang disengaja sebagai kemungkinan. Atas tindak pidana pemalsuan vaksin Covid-19 oleh korporasi, korporasi dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.
5. Artikel ini tidak terindikasi plagiasi karena diterbitkan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang memiliki reputasi Jurnal Nasional yang terakreditasi dan terindeks di Sinta 2,
6. Kesesuaian bidang ilmu: Tulisan dalam artikel yang diterbitkan selaras dengan bidang ilmu hukum yang penulis tekuni terutama perbuatan melawan hukum pemalsuan Vaksin Covid-19 dalam Hukum Kesehatan merupakan kejahatan pemalsuan, sebagai dosen Fakultas Hukum UNJA, yang memiliki latar belakang Dr. Ilmu Hukum di Bidang Hukum Pidana dari Program Doktor Universitas Airlangga Surabaya.

Makassar, 21 September 2021

REVIEWER : 1 / 2 **)



Nama: Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.

NIP: 196610181991031002

Jabatan Fungsional: Guru Besar

Unit Kerja: FH Universitas Hasanudin

LEMBAR HASIL PENILAIAN
SEJAWAT SEBIDANG atau *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : **The Act Against The Law Of Counterfeiting The Covid 19 Vaccine In The Health Law**

Jumlah Penulis : 1 Orang

Nama-nama Penulis : Sahuri Lasmadi

Status Penulis : Penulis ke 1

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama jurnal : **International Journal of Law Reconstruction (IJLR)**

b. Nomor ISSN : **E-ISSN 2775-8885**

c. Vol., No., Bulan, Tahun : **Volume 5, Number 2, September 2021**

d. Penerbit : **Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

e. DOI Artikel (jika ada) : **DOI:<http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17545>**

f. Alamat Web Jurnal : **<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lawreconstruction/article/view/17545/5821>**

g. Terindeks di : **Sinta 2**
<https://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=6197>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi **)
(beri tanda $\checkmark$ yang dipilih) ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐ Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks ***)

HASIL PENILAIAN *Peer Review* :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal JURNAL ILMIAH			Nilai Akhir Yang Diperoleh *)
		Internasional / Bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional ***) ☐	
1	Kelengkapan unsur isi karya (10%)		2,5		2,5
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		7
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		7,5
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan (30%)		7,5		7
	Total 100%		25		24
	Kontribusi Pengusul Penulis ke 1 100% x Nilai Akhir yang diperoleh = 24 x 1 = 24				

Catatan Penilaian ARTIKEL oleh Reviewer/Komentar Peer Review:

1. Artikel yang diusulkan ini merupakan jurnal yang terbit di Sinta 2 dan memenuhi kelengkapan unsur-unsur sebagai artikel dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi. Karena dalam artikel membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Vaksin Covid 19 Dalam Undang-Undang Kesehatan. Pokok pembahasan difokuskan Masalah pemalsuan vaksin bukan masalah kesehatan belaka tetapi juga masalah

2. Ruang lingkup & kedalaman pembahasan dalam Artikel ini masuk dalam ruang lingkup jurnal ilmiah mengingat dalam jurnal ini ada ide pengembangan hukum mengenai Perbuatan melawan hukum pemalsuan Vaksin Covid-19 dalam Hukum Kesehatan merupakan kejahatan pemalsuan, di mana mengandung unsur berupa keadaan objek yang tidak benar atau salah bahwa sesuatu hanya dari luar seolah-olah benar ketika fakta ini bertentangan dengan kebenaran. Tindak pidana pemalsuan vaksin Covid-19 umumnya diatur dalam Pasal 386 Ayat 1 KUHP terkait tindak pidana penipuan dan pemalsuan. Namun, hal itu secara khusus diatur dalam peraturan mengenai hukuman pendistribusikan vaksin palsu di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 196, 197, 198, dan UU 201 Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Kecukupan dan kemutakhiran dalam Penelitian sangat memadai karena metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi. Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum sering dikonsep sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan/undang-undang disusun sebagai aturan atau norma, yang merupakan tolok ukur perilaku manusia yang dianggap tepat. Metode penelitian ini dipilih agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
4. Dalam artikel ini ada hal baru yang ditawarkan bahwa memproduksi dan mengedarkan persiapan vaksin palsu, yang dimaksudkan dengan memproduksi atau melakukan proses produksi, adalah upaya untuk mengubah satu kebaikan menjadi yang lain atau mewujudkan layanan. Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam kesengajaan, yaitu niat yang disengaja, kepastian yang disengaja, dan tindakan yang disengaja sebagai kemungkinan. Atas tindak pidana pemalsuan vaksin Covid-19 oleh korporasi, korporasi dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.
5. Artikel ini tidak terindikasi plagiasi karena diterbitkan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang memiliki reputasi Jurnal Nasional yang terakreditasi dan terindeks di Sinta 2, <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17545>.
6. Kesesuaian bidang ilmu: Artikel yang diterbitkan selaras dengan bidang ilmu hukum yang penulis tekuni terutama Perbuatan melawan hukum pemalsuan Vaksin Covid-19 dalam Hukum Kesehatan merupakan kejahatan pemalsuan, sebagai dosen Fakultas Hukum UNJA, yang memiliki latar belakang Dr. Ilmu Hukum di Bidang Hukum Pidana dari Program Doktor Universitas Airlangga Surabaya.

Jambi, 20 September 2021
REVIEWER : 1 / 2 **)



Nama: **Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H.**
NIP: **195503231984031001**
Jabatan Fungsional: **Guru Besar**
Unit Kerja: **FH Universitas Jambi**